

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya dikendalikan oleh pemerintah pusat (sentralistik) mulai bergeser menjadi sistem yang desentralistik dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah terutama desa.²

Pemerintah terus menciptakan *good governance* meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hal ini didasari dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mencermati pada poin menimbang bahwa alokasi dana desa yang bersumber dari APBN perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.

² Lilik Ambarwati dan Ulva Nur Novia Handayani, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, Seminar Nasional STIE Widya Wiwaha, hlm. 129 dalam <http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1748> di akses 17 Oktober 2023

Pengalokasian dana desa ke setiap desa dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan maka ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan setiap desa. Untuk menilai tingkat geografis tersebut dilihat dari faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas atau transformasi.³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas –asas dalam pengelolaan keuangan, salah satu pedomannya adalah asas akuntabel.⁴

Pemerintahan yang baik harus bersifat terbuka dalam pengelolaan keuangannya kepada publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara. Permasalahan terkait dengan akuntabilitas masih menjadi persoalan yang masih dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah hingga saat ini.

³ Yohanes Oci, Heru Wahyudi, dan Zakaria Habib Al-Ra'zie, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Adhikari*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 443-456 dalam <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88> diakses 17 Oktober 2024

⁴ Lilik Ambarwati dan Ulva Nur Novia Handayani, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,.....", hlm. 130

Akuntabilitas menjadi sebuah pengawasan dan pengendalian penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung sebuah keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut salah satunya yaitu kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan. Faktor yang tidak kalah penting adalah sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa sehingga dapat melibatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana akhir kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana desa sangat diperlukan untuk media transparansi dalam penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa.⁵

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa salah satunya adalah pengendalian internal. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)*, pengendalian internal merupakan serangkaian tindakan yang terdiri dari serangkaian proses dalam

⁵ Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina dan Halmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat), *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, hlm. 159-180 dalam <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/69> diakses 20 Oktober 2023

organisasi. Pengendalian internal masuk dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.⁶

Pengendalian meliputi berbagai teknik, prosedur dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk memperoleh suatu sistem informasi akuntansi yang efisien dan juga dapat diandalkan, sehingga manajemen memperoleh bantuan dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha dan menjaga keamanan aset perusahaan.⁷

Upaya dalam mencapai pemerintah yang transparan dan akuntabel bukan berarti tidak mengalami kendala. Kendala yang mungkin terjadi adalah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibat tidak tercapainya tujuan dari organisasi dimana dalam hal ini adalah organisasi pemerintah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kecurangan yang terjadi biasanya dipicu karena lemahnya pengendalian intern dalam suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lemahnya sistem pengendalian internal diantaranya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Apabila kelima faktor tersebut dilakukan dengan baik oleh setiap elemen pemerintah maka tujuan pemerintah akan tercapai dengan maksimal. Dalam lingkungan pemerintah pengendalian internal diciptakan dengan upaya agar

⁶ Sujarweni. V. W. 2015 . Akuntansi Biaya: Teori dan Penerapannya Seluk Beluk Akuntansi. Pustaka Baru Press

⁷ Harnanto, H. *Akuntansi Biaya: Konsep dan Metodologi Penggolongan Biaya Elemen Biaya Produksi Perhitungan Harga Pokok Produksi*. (BPFE: Yogyakarta, 2017)

pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan pengendalian internal dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dapat mengelola dan menyajikan laporan keuangan negara dengan andal, aset negara dikelola dengan aman dan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁸

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa selain pengendalian internal adalah kompetensi pemerintah desa. Kompetensi aparat pemerintah desa penting karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan akan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana desa yang baik pemerintah seharusnya memiliki sumber daya berkualitas yang tentunya di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan atau seminar dan tentunya memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Akuntabilitas juga dipengaruhi oleh peran perangkat desa. Perangkat desa merupakan bagian unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki desa secara baik yang bercirikan demokratis dan juga desentralisasi. Sesuai Undang-Undang Desa dalam pasal 1 angka 3, kedudukan perangkat desa adalah

⁸ Gita Putri Agustina dan Ikhsan Budi Riharjo, “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5 No. 4, hlm. 1-15 dalam <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/> diakses 14 Desember 2023

membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa.

Pertanggungjawaban dalam melakukan kebijakan desa sebagai upaya dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di desa yaitu dengan meningkatkan suatu sistem keuangan akuntansi yang ada di desa masing-masing. Dalam pembuatan laporan keuangan disesuaikan dengan pos-pos atau prosedur yang ada dan dibuat oleh perangkat desa yang sudah ahli dengan bidangnya agar laporan keuangan berkualitas.⁹

Akseibilitas juga merupakan hal yang penting selain kompetensi dan peran perangkat desa yang merupakan faktor untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akseibilitas merupakan bagian dari prinsip *good governance*, karena salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah akseibilitas laporan keuangan yang baik. Pemerintah harus transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Masyarakat (publik) pada dasarnya memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain yaitu hak untuk memperoleh dan diberi informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Desa yang memperoleh anggaran dana salah satunya dirasakan oleh desa-desa yang terdapat di Kecamatan Boyolangu. Kecamatan Boyolangu

⁹ Ali Imron, "Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kebijakan Desa, Akseibilitas Laporan Keuangan dan Siskeudes Terhadap Akutabilitas Desa di Kecamatan Pemalang, *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*, Vol. 6, No.1, (2023), hal. 2

¹⁰ Dwi, Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Akutabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol.20, No. 2, (2020), hal. 283

merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah paling timur Kabupaten Tulungagung. Luas wilayahnya mencapai 34,27 Km. Desa yang berada di Kecamatan Boyolangu berjumlah 17 desa yang berstatus desa semua.¹¹ Terkait dengan perolehan dana desa di desa se- Kecamatan Boyolangu, hal ini dapat dilihat dari adanya data yang diperoleh dari Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023. Dimana dana desa yang digelontorkan kepada desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Boyolangu tersebut lebih difokuskan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan desa juga diarahkan dalam percepatan SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.¹² Berikut ini adalah daftar besaran dana desa yang dikelola setiap desa di Kecamatan Boyolangu antara lain adalah sebagai berikut:

¹¹ Kecamatan Boyolangu, <https://boyolangu.tulungagung.go.id> (diakses 6 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB)

¹² Bupati Kabupaten Tulungagung, *Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023*, Lampiran 1 dalam <https://www.jdih.tulungagung.go.id>, diakses 11 Desember 2024

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Tahun 2023
Se Kecamatan Boyolangu

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Wajak Kidul	827.331.000
2	Sanggrahan	808.181.000
3	Pucung Kidul	967.117.000
4	Boyolangu	1.034.571.000
5	Ngranti	1.247.535.000
6	Kendalbulur	1.291.390.000
7	Bono	1.242.689.000
8	Waung	1.394.862.000
9	Moyoketen	877.067.000
10	Wajak Lor	924.741.000
11	Karangrejo	962.687.000
12	Kepuh	951.049.000
13	Tanjungsari	922.920.000
14	Serut	1.012.491.000
15	Beji	923.283.000
16	Sobontoro	1.057.697.000
17	Gedangsewu	969.801.000
TOTAL		17.415.412.000

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa desa se-Kecamatan Boyolangu telah menerima anggaran dana desa yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adanya perhitungan anggaran dana desa yang didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat mengelola dana desa dengan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan penuh pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Diketahui bahwa dana desa yang ada di Kecamatan Boyolangu tersebut diatas dana paling besar pada

Desa Waung yaitu sebesar Rp. 1.394.862.000 dan paling rendah pada Desa Sangrahan sebesar Rp. 808.181.000.

Salah satu contoh desa di Kecamatan Boyolangu yang telah melakukan penerapan pengelolaan keuangan desa yang cukup baik adalah Desa Sobontoro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlana dan Muchamad Choirul Anam¹³ tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, cukup baik dan realistis karena sudah tersusun didalam rencana anggaran biaya (RAB).

Titik rawan pengelolaan dana desa adalah pada pengelolaan administrasi yang ada, jika administrasi tidak dikelola dengan baik maka secara tidak langsung dapat menjadikan salah satu indikator terjadinya penyimpangan dana desa, diantaranya yaitu terdapat pembukuan yang kurang memadai, penyampaian laporan yang tidak tepat waktu, sistem pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi instansi, terjadinya pengadaan fiktif serta kartu inventaris barang yang kurang tertib. Maka dari itu perlunya suatu sistem pengelolaan keuangan desa supaya dana desa tersebut dapat tersalurkan dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴

¹³ Marlana dan Muchamad Choirul Anam, "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung", *Journal of Accounting and Tax*, Vol. 01, No. 02, (2022), hal. 99

¹⁴ Ending Sri Pujiani, Baiq Anggun Hilendir L dan Widia Astuti, "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Risma*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 599

Dengan anggaran dana desa yang nominalnya tidak sedikit menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dana desa muncul sebagai konsep penting dalam upaya mengurangi peluang korupsi dan memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal serta pengelolaan dana. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh aparat desa di Kecamatan Boyolangu bahwa beberapa desa di Kecamatan Boyolangu memiliki persoalan terkait dengan keterbukaan anggaran penggunaan dana desa dan juga adanya keterlambatan dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa. Persoalan ini muncul sebagai akibat dari kurangnya komitmen pemerintah desa terkait transparansi anggaran yang seharusnya sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana desa yang dapat memberikan informasi perihal besaran dana desa dan juga penggunaan dana desa untuk keperluan pembangunan berupa persen begitu juga untuk bidang pemberdayaan dan bidang sosialnya. Terkait dengan masalah keterlambatan dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa, menurut keterangan dari perangkat desa

Moyoketen, ada beberapa desa di Kecamatan Boyolangu yang belum melaporkan hasil pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa di tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afida Octaviani terkait dengan pembagian tanggungjawab dalam penyusunan laporan di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu terdapat kendala yaitu kurangnya SDM yang mumpuni dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Disebutkan bahwa di Desa Kendalbulur laporan pertanggungjawaban hampir seluruhnya dibuat oleh Bendahara Desa. Kasi/Kaur yang diberikan wewenang untuk membantu proses pelaporan dianggap kurang aktif dalam perannya. Kedepannya pemerintah Desa Kendalbulur akan melakukan sosialisasi terkait hal ini.¹⁵

Alasan peneliti memilih alokasi dana desa (ADD) sebagai bahan penelitian adalah dikarenakan alokasi dana desa (ADD) mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Oleh karena itu, apabila ADD benar-benar dikelola dengan baik dan jujur melalui peningkatan sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, peran perangkat desa dan aksesibilitas laporan keuangan yang optimal maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁵ Afida Octaviani, “Komparasi Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bono dan Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”, (Tulungagung: Skripsi, 2022), hlm. 121-122

Berdasarkan uraian fenomena dari latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *"Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Peran Perangkat Desa Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung"*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disajikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang efektif dan efisien. Adanya persoalan mengenai akuntabilitas dana desa terkait dengan keterbukaan akses laporan dana desa dan juga adanya keterlambatan dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa. Hal ini mengundang pertanyaan tentang apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut dan faktor mana yang paling signifikan dalam mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk mengurai hubungan antara variabel pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, peran perangkat desa dan aksebilitas laporan keuangan untuk membantu pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih akurat tentang strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah

dalam meningkatkan akuntabilitas alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana pengaruh akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana pengaruh pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, peran perangkat desa dan akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Untuk menguji pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk menguji pengaruh akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
5. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, peran perangkat desa dan akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantara kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap kajian mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dapat menunjang keberhasilan kinerja Pemerintah Desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Peran Perangkat Desa, dan Akseibilitas Laporan Keuangan yang diharapkan dapat

dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya khususnya bagi Perangkat Desa.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, keintelektualan bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik serta untuk penelitian selanjutnya. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian yang akan datang terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian serta diharapkan untuk menggunakan alat ukur lain dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa atau dapat membandingkan dengan alat ukur yang lainnya dan memperluas penelitian ke daerah lainnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang dibahas peneliti agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti

mengambil lima variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu diantaranya:

a. Variabel Independen

Variabel ini disebut sebagai variabel stimulus, input, predictor, dan antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi.

¹⁶Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengendalian internal (X1), kompetensi pemerintah desa (X2), peran pemerintah desa (X3), dan aksebilitas laporan keuangan (X4).

b. Variabel Dependen

Variabel dependen disebut juga variabel respon, output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. ¹⁷ variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y).

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu 17 desa di Kecamatan Boyolangu yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tulungagung. Peneliti mengambil desa di Kecamatan Boyolangu sebagai subjek karena berdasarkan hasil observasi sebelumnya terdapat persoalan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang perlu dikaji secara mendalam

¹⁶ Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik*, (Jakarta: Alim Publishing, 2016), hlm. 40

¹⁷ *Ibid...*, hlm. 40

melalui penelitian ini. Selain itu, masih belum adanya penelitian sebelumnya yang menggunakan lokasi yang sama dengan penelitian ini. Objek penelitian ini merupakan perangkat desa yang ada di Kecamatan Boyolangu yang berkompeten dalam pembuatan laporan keuangan dimana dalam satu desa diambil 4 orang dengan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bepada penelitian ini adalah Pengendalian Internal (X_1), Kompetensi Pemerintah Desa (X_2), Peran Perangkat Desa (X_3), Aksebilitas Laporan Keuangan (X_4) dan variabel terikat merupakan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).
- b. Data dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) diperoleh dari kuesioner (angket).

G. Penegasan Istilah

Pada sub bab penegasan istilah ini penulis akan mengklasifikasi arti atau konsep istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Ini bertujuan agar pembaca memiliki pemahaman yang jelas tentang makna istilah-istilah tersebut sesuai konteks penelitian. Dengan adanya penegasan istilah ini diharapkan dapat membantu meminimalisir terjadinya kebingungan atau penafsiran yang salah oleh pembaca terkait pemahaman istilah-istilah yang

digunakan dalam penelitian. Berikut ini merupakan definisi spesifik yang akan digunakan dalam penelitian:

1. Definisi Konseptual

- a. Pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berkala oleh pemimpin maupun seluruh pegawai guna memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi atau perusahaan telah tercapai melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, keandalan atas pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.¹⁸
- b. Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek berupa pengetahuan, kemampuan (*skill*), baik *softskill* maupun *hardskill*, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu.¹⁹
- c. Peran perangkat desa menurut Soekanto merupakan suatu kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas

¹⁸ Efa Mita Theresia dan Ika Kristiani, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Daerah Air Minum Salatiga (Pendekatan Coso Erm Integrated Framework)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 17 No 1, 2020, hlm. 72

¹⁹ Edison, dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*, (Bandung: Afabeta, 2018)

dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.²⁰Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa.

- d. Akseibilitas laporan keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Akseibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.²¹
- e. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menurut Mardiasmo merupakan bentuk kewajiban dari pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kegiatan yang diamanahkan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.²²

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Peran Perangkat Desa dan Akseibilitas

²⁰ Ita Wulandari, dkk. "Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor (Studi pada Desa Hitam Putih)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No.2, 2017, hlm. 148

²¹ Fauziah, M.R., dan Handayani, N., "Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 53 No 9, 2017, hlm. 6

²² Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm. 21

Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Secara operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, peran perangkat desa dan aksebilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi dipergunakan agar mempermudah dalam penyusunan skripsi yang didalamnya mencakup:

1. **Bagian Awal**, terdiri dari bagian sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.
2. **Bagian Utama**, merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasam penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini berisi mengenai teori yang mendukung penelitian ini diawali dengan *grand theory* yang menjadi landasan utama materi dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN : Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis)

BAB V PEMBAHASAN : Pada bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data

BAB VI PENUTUP : Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi

3. **Bagian Akhir,** terdiri dari daftar pustaka, (lampiran-lampiran), surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.